

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	WartaKota

Heru Pastikan Beri Hunian Terbaik

► Untuk Warga Eks Kampung Bayam

Cipayung, Warta Kota

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan pihak tertentu agar tidak mengompromi warga untuk menempati Kampung Susun Bayam, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Hal itu dikatakan Heru untuk menanggapi adanya 40 kepala keluarga (KK) eks Kampung Susun Bayam yang nekat mengisi hunian, padahal pemerintah daerah belum mengizinkan.

"Jangan ada pihak-pihak yang ngomporin, kasihan warga. Saya ngikutin detail loh, Pemda DKI memberikan yang terbaik kok buat warga, tidak ada menyakit," kata Heru usai panen bersama di Buperta Cibubur, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu (20/12/2023).

Heru mengatakan, pemerintah daerah sangat peduli terhadap warga eks Kampung Bayam di sekitar Jakarta International Stadium (JIS). Salah satunya dengan menyediakan hunian baru yang tak kalah bagus seperti di Rusunawa Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara.

"Kan sudah diberikan waktu itu, disampaikan disuruh pilih mau di mana. Dipilih di Nagrak, di sana kan bagus, kamarnya dua, ruang tamu satu, ada dapur, terus air bersih ada dan listrik ada," jelas Heru.

Dalam kesempatan itu, Heru juga menyerahkan pengelolaan Kampung Susun Bayam kepada perseroan daerah PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Termasuk menghadapi puluhan warga yang nekat masuk ke dalam kampung susun tersebut.

"Ya itu nanti diserahkan kepada Jakpro secara hukum, terima kasih," ucap pria yang juga menjadi Kepala Sekretariat Presiden RI ini.

Diketahui PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Persero) menegaskan, perseroan belum memberikan izin Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) untuk menempati Kampung Susun Bayam, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Hingga kini, Jakpro bersama stakeholder terkait sedang berupaya mencari konsep pengelolaan yang matang dan

secara legal formal tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Suasana Kondusif

Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin, mengatakan kerja sama seluruh pihak diperlukan demi menjaga suasana yang kondusif dan tidak memaksakan kehendak tanpa adanya keputusan dari pihak yang berwenang. Jika menilik ke belakang, secara historis warga Kampung Bayam merupakan penggarap lahan milik Pemprov DKI Jakarta dan tidak memiliki hak atas tanah yang ditempatinya tersebut.

"Meski demikian, seluruh masyarakat Kampung Bayam sejumlah 642 Kepala Keluarga (KK) ini sudah mendapatkan biaya kompensasi atas penggantian hunian mereka di Kampung Bayam," kata Iwan dari keterangannya pada Senin (18/12/2023).

Iwan mengatakan, dalam konteks hukum tersebut, Jakpro sudah menunaikan kewajibannya. Terlebih

pergantian ganti untung juga merupakan hasil musyawarah secara berkelanjutan dengan kelompok-kelompok warga eks Kampung Bayam.

"Jakpro menegaskan tidak mentolerir tindakan-tindakan di luar batasan yang berlebihan, seperti perilaku memasuki pekarangan secara ilegal dan memaksakan diri memasuki area yang sudah dikunci," tegas Iwan.

Menurutnya, perseroan tengah melakukan investigasi dan koordinasi dengan pihak berwenang terkait atas adanya potensi pelanggaran aturan yang terjadi. Dia mengimbau kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke area tersebut.

"Jakpro juga menambah personel pengamanan untuk memastikan hal yang serupa tidak terjadi lagi," ujar Iwan.

Sementara itu warga eks Kampung Bayam, Furqon menuntut kontrak sosial dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yakni Anies Baswedan. Diketahui, warga sudah dijanjikan untuk

bisa mengisi hunian tersebut.

"Kami prinsipnya program ini harus berjalan karena sesuai awal kontrak sosial kami dengan gubernur terdahulu," kata Furqon.

Menurut dia, nama-nama warga eks Kampung Bayam telah didaftarkan untuk mengisi hunian kampung susun. Namun sampai sekarang warga belum bisa menghuni lokasi tersebut, bahkan fasilitas air dan listrik belum terpasang sehingga warga mengambil air dari lokasi proyek yang ada di sekitar.

Dia berharap dengan nama para penduduk yang didaftarkan sebagai penghuni Kampung Susun Bayam bisa segera terealisasi. Namun kenyataannya hingga kini belum ada kejelasan.

Terlebih, air dan listrik di Kampung Susun Bayam belum terpasang sehingga pihaknya mengambil air dari proyek dekat lokasi. "Kami sudah didaftarkan. Ini tempat tinggal kami. Nggak diberikan air dan listrik, sebenarnya ada air dan listrik tapi tidak diberikan," tuturnya. (faf)



Foto-foto: Kompas/ Heru Sri Kumoro, Dok. Warta Kota